

Kartius: Pemprov Terus Data Aset

PONTIANAK, TRIBUN - Asisten III Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Administrasi Keuangan, Kartius, yakin tahun depan laporan APBD Kalbar akan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kalbar, jelasnya, satu-satunya Pemprov di Indonesia yang bisa mencatatkan pemeriksaan aset oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Tahun depan target laporan APBD bisa meraih WTP. Hal ini sesuai apa yang disam-

paikan Gubernur. Capaian ini tentunya atas dasar kita merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang mencatatkan asetnya oleh BPK. Tudingan terjadinya pemanfaatan aset atau jual beli aset yang dilakukan Pemprov ternyata tidak benar," ujar Kartius kepada *Tribun*, Kamis (24/11).

Pemprov Kalbar, jelasnya, setiap tahun mengajukan sekitar 30 aset untuk disertifikat ke

■ Bersambung ke Hal. 15

Kartius: Pemprov Terus Data Aset

Sambungan Hal. 9

Badan Pertahanan Nasional (BPN). Namun dalam setiap tahunnya hanya 2 hingga 10 aset yang bisa memiliki sertifikat.

"Termasuk aset tanah Pemprov di Jeruju seluas 6 hektare. Itu berhasil kita sertifikasi atas nama Pemprov pada 2010 lalu. Kondisi tanah itu sudah ditempati masyarakat, dan mereka sudah mengaku itu tanah Pemprov," jelas Kartius.

Terhadap penyelesaian tersebut, Pemprov berencana akan menawarkan berbagai opsi kepada masyarakat. Termasuk

membangun Rusunawa sehingga bisa menampung masyarakat tidak mampu.

"Tanah 6 hektare milik Pemprov di Jeruju kita sudah buat sertifikatnya, yang sebelumnya berpuluh tahun tidak ada. Kita tawarkan opsi apakah mau dibeli atau akan kita bangun Rusunawa. Ini tentunya akan dibahas lebih lanjut beserta DPRD. Bangunan DPRD yang saat ini sudah memiliki satu sertifikat, dulu terpecah menjadi tujuh bagian. Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso juga sudah bersertifikat, termasuk Gedung Kartini," ung-

kapnya.

Ia menambahkan, tanah Pemprov seluas 20 hektare di Paoh, Sintang, yang dibangun UPT Pertanian juga sudah bersertifikat. Ini juga termasuk Bukit Soeharto di Kabupaten Landak yang sudah puluhan tahun tidak bersertifikat dan kini sudah memiliki sertifikat.

"Setiap tahun kita terus berupaya mengajukan sertifikat. Cuma kita terkendala dokumennya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat dari BPN karena sudah puluhan tahun. Untuk anggaran

setiap tahun yang kita ajukan ke DPRD tidak pernah di coret, DPRD mendukung," tegasnya.

Kartius mengakui masih adanya kelemahan dalam pengelolaan administrasi aset Pemprov. Akan tetapi, saat ini masyarakat bisa melihat daftar aset hasil pemeriksaan BPK. Data tersebut sudah ada di Inspektorat Kalbar dan Sekretaris Dewan.

"Tidak ada yang ditutupi. Yang meragukan pemerintah adanya jual beli atau pinjam pakai aset semuanya bisa dilihat," pungkasnya. (rhd)